

**BAB V**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**5.1. Analisis Tabulasi Silang (Crosstab)**

Untuk mendeskripsikan dinamika pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, IPM dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kota Jambi digunakan analisa dengan prosedur Crosstab dengan menggunakan aplikasi SPSS. Crosstab merupakan analisa yang masuk dalam kategori statistik deskripsi, dimana menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama dan pengujian hubungan antara dua variabel atau lebih. (Norfai, 2020)

**5.1.1. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kota Jambi Periode Tahun 2002-2024**

**Tabel 15. Hasil Crosstab Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

			Kemiskinan		Total
			Naik	Turun	
Pertumbuhan Ekonomi	PE < 0%	Count	4	0	4
		% within Pertumbuhan Ekonomi	100.0%	0.0%	100.0%
	PE 0-5%	Count	11	9	20
		% within Pertumbuhan Ekonomi	55.0%	45.0%	100.0%
	PE > 5%	Count	25	43	68
		% within Pertumbuhan Ekonomi	36.8%	63.2%	100.0%
<b>Total</b>		Count	40	52	92
		% within Pertumbuhan Ekonomi	43.5%	56.5%	100.0%

Sumber: Data SPSS diolah, 2025

Tabel 15. menunjukkan hasil tabulasi silang antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di Kota Jambi periode tahun 2002-2024. Penelitian ini membagi pertumbuhan ekonomi menjadi tiga kategori yaitu pertumbuhan ekonomi dibawah 0 persen, pertumbuhan ekonomi 0-5 persen dan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen ini merupakan target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024. Dari hasil tabulasi silang tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dibawah 0 persen diikuti dengan naiknya kemiskinan naik sebanyak 4 periode atau 100 persen. Sedangkan ekonomi yang tumbuh 0 sampai 5 persen diikuti dengan naiknya kemiskinan sebanyak 11 periode atau

sebesar 55 persen dan turunnya kemiskinan sebanyak 9 periode atau 45 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen yang diikuti naiknya kemiskinan ada sebanyak 25 periode atau sebesar 36,8 persen dan turunnya kemiskinan sebanyak sebanyak 43 periode atau 63,2 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan naiknya kemiskinan ada sebanyak 40 periode atau 43.5 persen sedangkan yang diikuti turunnya kemiskinan ada sebanyak 52 periode atau 56.5 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sudah cukup merata sehingga dampaknya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi minimal diangka 5 persen sebagai salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi.

### 5.1.2. Dinamika Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Jambi Periode Tahun 2002-2024

**Tabel 16. Hasil Crosstab Tingkat Inflasi dan Kemiskinan**

			Kemiskinan		Total
			Naik	Turun	
Inflasi	Inflasi Ringan	Count	31	44	75
		% within Inflasi	41.3%	58.7%	100.0%
	Inflasi Sedang	Count	9	8	17
		% within Inflasi	52.9%	47.1%	100.0%
Total	Count	40	52	92	
	% within Inflasi	43.5%	56.5%	100.0%	

Sumber: Data SPSS diolah, 2025.

Tabel 16. menunjukkan hasil tabulasi silang antara tingkat inflasi dengan kemiskinan di Kota Jambi periode tahun 2002-2024. Tingkat inflasi sebenarnya dibagi empat periode yaitu inflasi ringan (kurang dari 10%), inflasi sedang (10-30%), inflasi berat (30-100%) dan hiperinflasi(lebih dari 100%). Namun selama periode penelitian, inflasi yang terjadi di Kota Jambi hanya dapat dibagikan menjadi dua kategori yaitu inflasi ringan dan inflasi sedang. Dari hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa tingkat inflasi ringan yang diikuti dengan naiknya kemiskinan ada sebanyak 31 periode atau 41,3 persen. Sedangkan inflasi ringan yang diikuti dengan turunnya kemiskinan ada sebanyak 44 periode atau 58,7 persen. Sementara itu tingkat inflasi sedang yang diikuti dengan naiknya kemiskinan ada

sebanyak 9 periode atau sebesar 52,9 persen dan yang diikuti turunnya kemiskinan sebanyak 8 periode atau 47,1 persen. Secara keseluruhan, tingkat inflasi yang diikuti dengan naiknya kemiskinan ada sebanyak 40 periode atau 43.5 persen sedangkan tingkat inflasi diikuti turunnya kemiskinan ada sebanyak 52 periode atau 56.5 persen. Secara umum, inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan. Menurut Mankiw, kenaikan inflasi juga akan menaikkan garis kemiskinan yang akan mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin bila tidak diikuti dengan peningkatan daya beli atau pendapatan masyarakat. Namun inflasi yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kebijakan yang tepat justru bisa berdampak positif. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya permintaan barang dan jasa menunjukkan perekonomian berkembang, perusahaan tumbuh, dan lapangan kerja bertambah sehingga penduduk miskin memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan lebih baik.

### 5.1.3. Dinamika Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi Periode Tahun 2002-2024

**Tabel 17. Hasil Crosstab Upah Minimum dan Kemiskinan**

			Kemiskinan		Total
			Naik	Turun	
Upah Minimum	UM Naik Sampai 5%	Count	31	51	82
		% within Upah Minimum	37.8%	62.2%	100.0%
	UM Naik 5-10%	Count	6	1	7
		% within Upah Minimum	85.7%	14.3%	100.0%
	UM Naik > 10%	Count	3	0	3
		% within Upah Minimum	100.0%	0.0%	100.0%
Total	Count	40	52	92	
	% within Upah Minimum	43.5%	56.5%	100.0%	

Sumber: Data SPSS diolah, 2025.

Tabel 17. menunjukkan hasil tabulasi silang antara upah minimum dengan kemiskinan di Kota Jambi periode tahun 2002-2024. Penelitian ini membagi kenaikan UMP menjadi 3 kategori yaitu naik hingga 5%, naik 5-10 % dan kenaikan UMP lebih dari 10%. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sampai dengan 5 persen yang diikuti naiknya kemiskinan ada sebanyak 31 periode atau 37,8 persen dan yang diikuti turunnya kemiskinan ada sebanyak 51 periode atau 62,2 persen. Sedangkan kenaikan upah minimum lebih dari 5 sampai dengan 10 persen yang diikuti naiknya kemiskinan ada sebanyak 6 periode atau

85,7 persen sedang yang diikuti turunnya kemiskinan ada 1 periode atau 14,3 persen. Sementara itu kenaikan upah minimum lebih dari 10 persen yang diikuti naiknya kemiskinan ada sebanyak 3 periode atau 100 persen. Secara keseluruhan, kenaikan upah minimum diikuti kemiskinan naik ada sebanyak 40 periode atau 43.5 persen sedangkan kenaikan upah minimum yang diikuti kemiskinan turun ada sebanyak 52 periode atau 56.5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum yang memadai membuat daya beli masyarakat terutama pekerja berpendapatan rendah akan meningkat. Peningkatan daya beli inilah yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun dalam meningkatkan upah minimum, pemerintah harus mempertimbangkan besaran kenaikan tersebut agar tidak menjadi beban perusahaan yang justru bisa berdampak buruk bagi tenaga kerja. Kenaikan upah yang terlalu tinggi akan membuat perusahaan melakukan sejumlah efisiensi seperti pengurangan tenaga kerja. Jika hal ini terjadi maka jumlah pengangguran bisa meningkat dan kemiskinan menjadi tinggi.

#### 5.1.4. Dinamika Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Kota Jambi Periode Tahun 2002-2024

**Tabel 18. Hasil Crosstab IPM dan Kemiskinan**

			Kemiskinan		Total
			Naik	Turun	
IPM	Sangat Tinggi	Count	1	13	14
		% within IPM	7.1%	92.9%	100.0%
	Tinggi	Count	39	39	78
		% within IPM	50.0%	50.0%	100.0%
Total		Count	40	52	92
		% within IPM	43.5%	56.5%	100.0%

Sumber: Data SPSS diolah, 2025.

Tabel 18. menunjukkan hasil tabulasi silang antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kemiskinan di Kota Jambi periode tahun 2002-2024. Capaian IPM dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu IPM rendah (indeks dibawah 60), IPM sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ), IPM tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) dan IPM sangat tinggi ( $\text{IPM} \geq 80$ ). Namun sepanjang periode penelitian capaian IPM Kota Jambi hanya berada dikelompok IPM tinggi dan sangat tinggi. Hasil tabulasi silang

menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dengan kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} \leq 80$ ) yang diikuti kemiskinan naik ada sebanyak 39 periode atau 50 persen dan begitupun yang diikuti turunnya kemiskinan juga ada 39 periode atau 50 persen. Sedangkan IPM dengan kategori sangat tinggi diikuti naiknya kemiskinan ada 1 periode atau 7,1 persen dan kemiskinan turun ada sebanyak 13 periode atau 92,9 persen. Secara keseluruhan, IPM diikuti dengan kemiskinan naik ada sebanyak 40 periode atau 43.5 persen sedangkan IPM yang diikuti dengan kemiskinan turun ada sebanyak 13 periode atau 56.5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM sudah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. IPM menggambarkan kualitas hidup melalui tiga dimensi utama: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup (pendapatan per kapita). Ketika IPM meningkat, itu mencerminkan perbaikan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang semuanya merupakan faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan, individu menjadi lebih produktif dan mampu mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan mereka jatuh ke dalam kemiskinan.

#### 5.1.5. Dinamika Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kota Jambi Periode Tahun 2002-2024

**Tabel 19. Hasil Crosstab Jumlah Penduduk dan Kemiskinan**

			Kemiskinan		Total
			Naik	Turun	
Jumlah Penduduk	Tumbuh <0%	Count	2	6	8
		% within Jumlah Penduduk	25.0%	75.0%	100.0%
	Tumbuh 0-1.11%	Count	35	41	76
		% within Jumlah Penduduk	46.1%	53.9%	100.0%
	Tumbuh >1.11%	Count	3	5	8
		% within Jumlah Penduduk	37.5%	62.5%	100.0%
<b>Total</b>		Count	40	52	92
		% within Jumlah Penduduk	43.5%	56.5%	100.0%

Sumber: Data SPSS diolah, 2025.

Tabel 19. menunjukkan hasil tabulasi silang antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan kemiskinan di Kota Jambi periode tahun 2002-2024. Penelitian ini membagi jumlah penduduk menjadi tiga kelompok yaitu penduduk yang tumbuh dibawah 0%, penduduk yang tumbuh 0-1,11 persen dan jumlah penduduk yang tumbuh lebih dari 1,11%. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 1,11%. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tumbuh kurang dari 0 persen diikuti kemiskinan naik ada sebanyak 2 periode atau 25 persen dan yang diikuti kemiskinan turun ada sebanyak 6 periode atau 75 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang tumbuh lebih dari 0 sampai 1,11 persen diikuti naiknya kemiskinan ada 35 periode atau 46,1 persen dan yang diikuti kemiskinan turun ada sebanyak 41 periode atau 53,9 persen. Sementara itu jumlah penduduk yang tumbuh lebih dari 1,11 persen diikuti naiknya kemiskinan ada 3 periode atau 37,5 persen dan yang diikuti kemiskinan turun ada sebanyak 5 periode atau 62,5 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan jumlah penduduk diikuti dengan kemiskinan naik ada sebanyak 40 periode atau 43.5 persen sedangkan yang diikuti kemiskinan turun ada 52 periode atau 56.5 persen. Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Jambi masih terkendali sehingga diikuti dengan penurunan kemiskinan atau jumlah penduduk miskin. Beberapa hal yang mendorong pertumbuhan penduduk untuk mengurangi kemiskinan antara lain peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan perekonomian yang lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Namun, laju pertumbuhan penduduk harus terus dikendalikan agar tidak terjadi ledakan dikemudian hari. Karena ketika penduduk tumbuh pesat, kebutuhan akan sumber daya seperti pangan, air, dan perumahan tentu juga akan meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, maka banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan.

## **5.2. Analisis Error Correction Model (ECM),**

Kemiskinan di Kota Jambi sepanjang tahun 2002-2023 mengalami fluktuasi. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, IPM dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kota Jambi pada periode 2002-2003 menggunakan analisis Error Correction Model (ECM). ECM mampu mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 9. Melalui metode ini, diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi dengan kemiskinan di Kota Jambi. Adapun tahapan pengolahan data dengan metode ECM meliputi:

1. Uji stasioneritas,
2. Regresi jangka panjang,
3. Uji kointegrasi,
4. Regresi jangka pendek (ECM),
5. Uji hipotesis.

### **5.2.1. Uji Stasioneritas**

Uji stasioner adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian bersifat stasioner atau tidak. Uji stasioner digunakan ketika pola data bersifat *time series*. Pengujian ini dilakukan menggunakan pendekatan Uji Augmented Dickey-Fuller Test (ADF). Proses uji stasioneritas mencakup pengujian pada tingkat Level, First Difference (D1), dan Second Difference (D2). Apabila data yang dihasilkan tidak stasioner pada unit level (0), bisa menggunakan unit 1 (*first Difference*) atau bahkan unit 2 (*Second Difference*) hingga seluruh variabel dinyatakan stasioner.

Pengujian ini meliputi Unit Root Test atau uji akar unit dan Uji Kointegrasi (*Test of Degree of Cointegration*) dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan sebesar 10% ( $\alpha = 5\%$  dan 10%).

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H<sub>0</sub>: Data mengandung unit root (tidak stasioner).

H<sub>1</sub>: Data tidak mengandung unit root (stasioner).

Keputusan mengenai stasioneritas data ditentukan berdasarkan nilai probabilitas (p-value) dimana jika  $p\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti data stasioner. Namun jika  $p\text{-value} > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang menunjukkan data tidak stasioner.

Selain itu, stasioneritas data juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-kritis dengan t-statistik yaitu jika  $t\text{-kritis} < t\text{-statistik}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang menunjukkan data stasioner. Sebaliknya, jika  $t\text{-kritis} > t\text{-statistik}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti data tidak stasioner. Pengujian ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap pengolahan lebih lanjut.

### 5.2.1.1. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Pengujian akar unit dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam penelitian bersifat stasioner atau tidak dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar

.10% ( $\alpha = 5\%$  dan  $10\%$ ). Penilaian dilakukan dengan melihat tingkat probabilitas (p-value) pada setiap variabel yang diuji. Proses pengujian ini dilakukan secara bertahap, dimulai pada tingkat Level, kemudian First Difference, dan dilanjutkan ke Second Difference hingga data dinyatakan stasioner. Hasil pengujian ini penting untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan memenuhi kriteria stasioneritas sebelum melanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

**Tabel 20. Hasil Uji Stasioneritas Tingkat Level Periode Tahun 2002-2024**

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
LOGY	0.3670	5	11	86
PE	0.2574	9	11	82
IF	0.6845	8	11	83
UM	0.0208	5	11	86
IP	0.9169	5	11	86
LOGJP	0.7626	9	11	82

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 9

Tabel 20. adalah hasil uji akar unit root test terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian pada tingkat level. Berdasarkan pengujian tersebut maka dapat diperoleh hasil bahwa semua data tidak stasioner yaitu jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah

Penduduk karena memiliki nilai  $p > \alpha=5\%$ . Berdasarkan hasil tersebut maka persamaan regresi ini dapat didukung oleh ECM adalah dapat digunakan dalam penelitian ini karena telah memenuhi kriteria yang diperlukan.

**Tabel 21. Hasil Uji Stasioneritas Tingkat *First Difference* Tahun 2002-2024**

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
D(LOGY)	0.0049	4	11	86
D(PE)	0.0286	8	11	82
D(IF)	0.0002	8	11	82
D(UM)	0.0000	7	11	83
D(IP)	0.1001	8	11	82
D(LOGJP)	0.1738	8	11	82

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 9

Tabel 21. menunjukkan hasil uji stasioneritas terhadap variabel yang digunakan pada tingkat *first difference* (D1). Adapun hasil dari pengujian tersebut diperoleh bahwa variabel jumlah penduduk miskin, inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum telah stasioner karena memiliki nilai  $P < \alpha=5\%$ . Sedangkan variabel IPM dan jumlah penduduk tidak stasioner sehingga proses pengujian dilanjutkan ke *Second Difference* hingga data dinyatakan stasioner.

**Tabel 22. Hasil Uji Stasioneritas Tingkat *Second Difference* Tahun 2002-2024**

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
D(LOGY,2)	0.0000	3	11	86
D(PE,2)	0.0000	7	11	82
D(IF,2)	0.0000	7	11	82
D(UM,2)	0.0000	7	11	82
D(IP,2)	0.0000	7	11	82
D(LOGJP,2)	0.0000	11	11	78

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 9

Tabel 22. menunjukkan hasil uji stasioneritas terhadap variabel yang digunakan pada tingkat *Second Difference* (D2). Adapun hasil dari pengujian tersebut diperoleh bahwa data semua variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk telah stasioner karena memiliki nilai  $P < \alpha=1\%$ . Sehingga dengan hasil tersebut maka pengolahan data dapat dilanjutkan dengan menggunakan data pada tingkat *second difference*.

### 5.2.2. Regresi Jangka Panjang

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Variabel terikat yaitu jumlah penduduk miskin pada periode tahun 2002 – 2024 maka dilakukan regresi jangka panjang dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *eviews 9*. Adapun Model regresi Jangka panjang yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana pada persamaan 3.1.

Hasil regresi jangka panjang dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 23. Hasil Regresi Jangka Panjang Periode Pengamatan 2002-2024**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	0.012696	0.008702	1.458937	0.1482
IF	-0.010063	0.006189	-1.625820	0.1076
UM	-0.007761	0.003608	-2.151150	0.0343
IP	-0.043842	0.012151	-3.608027	0.0005
LOGJP	2.279029	0.258197	8.826717	0.0000
C	-15.99058	3.087463	-5.179198	0.0000
R-squared	0.693525			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 9

Berdasarkan hasil regresi jangka panjang diatas maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Y = -15.99058 + 0.012696PE - 0.010063IF - 0.007761UM - 0.043842IP + 2.279029JP + e_i$$

(0.1482)      (0.1076)      (0.0343)      (0.0005)      (0.0000)

Pengujian jangka panjang yang dilakukan dengan menggunakan metode *OLS* secara simultan diperoleh hasil bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas yang berada dibawah tingkat  $\alpha=1\%$ , dimana nilai  $p = 0.000000 < \alpha=1\%$ . Sementara itu secara parsial atau terpisah variabel Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi dengan probabilitas masing-masing sebesar

0.0343, 0.0005 dan 0.0000. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi karena probabilitasnya lebih dari 10 persen.

Nilai Koefisien sebesar -0.007761 menunjukkan bahwa jika upah minimum naik 1% maka jumlah penduduk miskin di Kota Jambi akan turun sebesar 0.007761 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai Koefisien sebesar -0.043842 menunjukkan bahwa jika IPM naik 1% maka jumlah penduduk miskin di Kota Jambi akan turun sebesar 0.043842 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien sebesar 2.279029 menunjukkan bahwa jika jumlah penduduk naik sebanyak satu jiwa maka jumlah penduduk miskin di Kota Jambi juga akan naik sebanyak 2.279029 jiwa dengan ketentuan jika variabel lain tetap. Hal ini berlaku sebaliknya.

Upah minimum, IPM dan Jumlah Penduduk menjadi variabel yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi dalam jangka panjang. Hasil ini mencerminkan bahwa naik turunnya jumlah penduduk miskin di Kota Jambi akan dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum, IPM dan jumlah penduduk. Hasil ini dapat menggambarkan bahwa dalam jangka panjang pemerintah harus melakukan kebijakan yang berfokus pada pembangunan manusia, pengendalian jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum setiap tahunnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, tetapi hubungan ini bersifat kompleks dan tidak selalu linier. Di Kota Jambi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini mencerminkan distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga dampaknya tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga mampu menekan jumlah penduduk miskin. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan sebagai fungsi menurun dari tingkat ketidakmerataan. Maka perlu campur tangan pemerintah untuk menciptakan harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dan pemulihan kemiskinan karena dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sangat bergantung pada distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata menjadi kunci penting dalam memastikan kenaikan besaran upah minimum agar bisa berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini karena penyesuaian nilai upah minimum yang dihitung dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu ( $\alpha$ ) jangan sampai membebani perusahaan. Karena upah minimum bisa menjadi simalakama. Jika terlalu tinggi dapat membuat perusahaan melakukan PHK karena melakukan efisiensi karyawan sehingga justru menciptakan pengangguran dan meningkatkan kemiskinan. Sehingga harus ada *win win solution* dalam penetapan besaran upah minimum yang tidak membebani perusahaan namun juga tidak merugikan karyawan.

Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mencerminkan pembangunan manusia dari dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup telah berhasil. IPM menggambarkan meningkatnya kualitas SDM di Kota Jambi sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin karena kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang juga meningkat. Disisi lain, dalam mengendalikan jumlah penduduk perlu optimalisasi program keluarga berencana seperti menggalakkan program KB untuk mengatur jumlah kelahiran dengan menyediakan alat kontrasepsi dan edukasi reproduksi. Pemerintah juga harus gencar melaksanakan kampanye kesadaran populasi yakni dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup. Selain peran pendidikan baik formal maupun informal juga penting dimana pengelolaan keluarga dapat membantu masyarakat membuat keputusan terkait jumlah anak.

### **5.2.3. Uji Kointegrasi**

Sebelumnya telah dilakukan uji stasioneritas sebagai persyaratan dalam menentukan model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan hasil bahwa data bersifat stasioner pada tingkat *first difference*. Maka selanjutnya dilakukan uji kointegrasi atas model yang akan digunakan dengan cara mencari nilai akar-akar unit dari nilai residual atau *error Correction Term* (ECT) persamaan jangka panjang yang telah diuji sebelumnya.

**Tabel 24. Hasil Uji Akar Unit terhadap Residual Persamaan Regresi OLS**

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.615925	0.0939
Test critical values: 1% level	-3.512290	
5% level	-2.897223	
10% level	-2.585861	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 9

Berdasarkan hasil yang digambarkan dalam tabel 24 bahwa pengujian akar unit dari nilai residual persamaan regresi jangka panjang pada tingkat data level menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0939 lebih kecil dari 10%. Sehingga dengan demikian maka hasil ini semakin menguatkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat kointegrasi pada tingkat level.

#### 5.2.4. Regresi Jangka Pendek (ECM)

Metode ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek antara variabel-variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kota Jambi periode tahun 2002–2024. Berikut model regresi jangka pendek (ECM) yang digunakan dengan melakukan estimasi menggunakan regresi OLS sesuai dengan persamaan 3.2.

**Tabel 25. Hasil Regresi Jangka Pendek Periode Pengamatan 2002-2024**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000952	0.006581	-0.144715	0.8853
D(EG,2)	-0.008924	0.006486	-1.375882	0.1726
D(IF,2)	0.001469	0.005160	0.284708	0.7766
D(KUM,2)	-0.005330	0.002414	-2.207396	0.0300
D(IP,2)	-0.094284	0.045963	-2.051295	0.0434
D(LOGJP,2)	-2.301898	1.317975	-1.746542	0.0844
ECT(-1)	-0.129040	0.036918	-3.495292	0.0008
R-squared	0.249155			
Prob(F-statistic)	0.000452			

Sumber: Data hasil pengolahan Eviews 9

Tabel 25. menunjukkan hasil estimasi dengan menggunakan model ECM, hasil regresi jangka pendek tersebut memperoleh hasil:

$$\begin{aligned}
DY = & -0.000952 - 0.008924PE_2 + 0.001469IF_2 - 0.005330UM_2 - 0.094284IP_2 - \\
& 2.301898JP_2 - 0.129040ECT-1+ei \\
& \qquad \qquad (0.1726) \qquad (0.7766) \qquad (0.0300) \qquad 0.0434 \\
& (0.0844) \qquad (0.0008)
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil regresi jangka pendek pada Tabel 25 menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh jangka pendek terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi. Hal ini didasarkan pada nilai probabilitas 0,000452 atau lebih kecil dari  $\alpha = 1\%$ . Nilai ECT signifikan pada tingkat alfa 1% secara statistik menunjukkan bahwa model spesifik yang digunakan valid dan nilai koefisien ECT yang sebesar -0.129040 menunjukkan bahwa fluktuasi keseimbangan jangka pendek akan dikoreksi menuju keseimbangan jangka panjang.

Sedangkan secara parsial hanya variabel Upah Minimum, IPM dan jumlah penduduk yang memiliki pengaruh jangka pendek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi dengan probabilitas masing-masing sebesar 0.0300 0.0434 dan 0.844. Nilai koefisien -0.005330 menunjukkan arti bahwa pada jangka pendek, bila upah minimum naik sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan turun sebanyak 0.005330 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien  $-0.094284$  menunjukkan arti bahwa pada jangka pendek, bila IPM naik sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan turun sebanyak 0.094284 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu nilai koefisien  $-2.301898$  menunjukkan arti bahwa pada jangka pendek, bila jumlah penduduk naik sebanyak satu jiwa maka jumlah penduduk miskin akan turun sebanyak 2.301898 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap.

Dalam jangka pendek hubungan upah minimum dan IPM juga bertanda negatif sama seperti pada jangka panjang. Artinya apabila upah minimum dan IPM naik maka jumlah penduduk miskin juga akan naik dan berlaku sebaliknya. Hal ini disebabkan karena dalam jangka pendek kenaikan upah akan diikuti dengan kenaikan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Dengan meningkatnya daya beli, masyarakat jadi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Upah Minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan yang menjadi solusi konkret untuk mengurangi kemiskinan.

Peningkatan daya beli pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi yang akhirnya berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Dalam teori lingkaran kemiskinan oleh Ragna Nurkse (1953) pendapatan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Pendapatan yang rendah mengakibatkan produktivitas masyarakat juga rendah sehingga kemampuan untuk menabung juga rendah.

Demikian pula hubungan IPM dan jumlah penduduk miskin yang juga bertanda negatif. Artinya dalam jangka pendek, peningkatan IPM akan mampu menurunkan kemiskinan di Kota Jambi. IPM mengukur kualitas hidup melalui tiga dimensi utama: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup (pendapatan per kapita). Ketika IPM meningkat, hal itu mencerminkan perbaikan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang semuanya merupakan faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan maka individu menjadi lebih produktif dan mampu mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan mereka jatuh ke dalam kemiskinan.

Namun hubungan jumlah penduduk dan kemiskinan dalam jangka pendek berbeda dengan jangka panjang. Jika dalam jangka panjang jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin maka pada jangka pendek justru sebaliknya. Peningkatan jumlah penduduk justru dapat menurunkan kemiskinan. Kondisi ini bisa saja terjadi karena beberapa hal seperti peningkatan permintaan barang dan jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor produksi yang berusaha memenuhi tersebut sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini seperti lazim terlihat dimana saat hadirnya penduduk baru maka dapat menciptakan usaha kecil atau informal dalam jangka pendek. Meski tidak selalu ideal, hal ini tentu berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Meski demikian hal ini tidak serta merta membiarkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jambi begitu saja karena jika tidak dikelola dengan baik peningkatan jumlah penduduk akan menekan sumber daya yang ada dan memperburuk kemiskinan dalam jangka panjang.

## **5.2.5. Uji Hipotesis**

### **5.2.6.1 Uji F Statistik (*Simultan*)**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam jangka panjang bahwa semua variabel secara bersama-sama (*Simultan*) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000 dengan tingkat signifikan 1%. Sementara berdasarkan hasil analisis jangka pendek diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000452 yang berarti bahwa dalam jangka pendek semua variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk sama dengan jangka panjang, berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kota Jambi tingkat signifikan 10%.

### **5.2.6.2. Uji T Statistik (*Parsial*)**

Berdasarkan hasil analisis data dalam jangka panjang bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, IPM dan jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi. Variabel upah minimum dan IPM memiliki probabilitas sebesar 0.0343 dan 0.0005 signifikan pada tingkat keyakinan 1% dan 5% serta memiliki pengaruh negatif sebesar -0.007761 dan -0.043842. Sedangkan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan yang searah atau positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau signifikansi 1% dengan koefisien sebesar 2.279029. Sementara itu dalam jangka pendek, hanya variabel Upah Minimum, IPM dan jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan dengan memiliki nilai probabilitas tingkat keyakinan 5% dan 10% yaitu 0.0300, 0.0434 dan 0.0844 sedangkan koefisiennya sebesar -0.005330, -0.094284 dan -2.301898.

### **5.2.6.3. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Melihat hasil analisis yang telah dilakukan dalam jangka panjang diperoleh hasil koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.693525 yang mengartikan bahwa kontribusi pengaruh variabel-variabel bebas seperti Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap variabel terikat yaitu jumlah penduduk sebesar 69,35% sementara sisanya yaitu sebesar 30,65% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model yang digunakan. Kemudian dalam analisis jangka pendek diperoleh nilai koefisien Determinasi ( $R^2$ )

sebesar 0.249155, berarti menunjukkan bahwa kontribusi variabel-variabel bebas seperti Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap variabel terikat yaitu jumlah penduduk sebesar 24.91% sementara sisanya yaitu sebesar 75.09% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model yang digunakan.

### **5.3. Analisis Ekonomi**

#### **5.3.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kota Jambi**

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang memiliki pengaruh searah namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi dengan probabilitas 0.1482 dan nilai koefisien sebesar 0.012696. Hal ini mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang signifikan pada pengentasan kemiskinan di Kota Jambi. Hal ini sama dengan penelitian Halim Najib Putri et al. (2023) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota dan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 – 2021. Begitupun penelitian oleh Putriani, P dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Jambi pada periode 2004-2017 karena disinyalir terjadi ketimpangan. Penelitian Nurhasanah (2019) juga mengungkap pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2000-2016.

Sementara itu dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi memiliki arah negatif tapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi pada periode 2002-2024. Hal ini sama dengan penelitian Bambang Budhijana (2019) berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017. Hasilnya mengungkap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan namun tidak signifikan. Artinya kenaikan Pertumbuhan Ekonomi akan diikuti dengan penurunan kemiskinan walaupun masih belum menghasilkan nilai hasil yang signifikan. Begitupun penelitian Juniati (2023) menyimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Jambi menunjukkan bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi belum mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga tidak berdampak signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan komposisinya, secara berurut, pada tahun 2023 PDRB ADHK 2010 Kota Jambi didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (29,19%), Transportasi dan Pergudangan (11,75%), Industri Pengolahan (10,75%), Konstruksi (9,70%) dan lain-lain yang persentasenya lebih rendah. Sektor-sektor ini ternyata belum mampu mendorong peningkatan produksi yang dapat menurunkan kemiskinan di Kota Jambi.

### **5.3.2. Pengaruh Laju Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Jambi**

Variabel Inflasi dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi pada periode 2002-2024 dengan masing-masing koefisiennya yaitu sebesar -0.010063 dan 0.001469 dengan probability 0.1076 dan 0.7766 atau diatas  $\alpha=10\%$ . Hasil ini sama dengan penelitian Dewi & Husein (2022) berjudul Analisis Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Aceh Barat pada 2022. Tim menyimpulkan inflasi justru berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Aceh Barat. Penelitian lain juga dilakukan oleh Oratmangun et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara.

Secara umum, inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan. Menurut Mankiw, kenaikan inflasi juga akan menaikkan garis kemiskinan yang akan mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin bila tidak diikuti dengan peningkatan daya beli atau pendapatan masyarakat. Inflasi yang naik cenderung akan diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin karena kenaikan harga barang dan jasa secara umum mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Namun inflasi yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kebijakan yang tepat juga dapat menurunkan kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya

permintaan barang dan jasa menunjukkan perekonomian berkembang, perusahaan tumbuh, dan lapangan kerja bertambah sehingga penduduk miskin memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan lebih baik.

### **5.3.3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi**

Dalam jangka panjang dan pendek, variabel upah minimum terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi dengan koefisien sebesar -0.007761 dan -0.005330 yang berarti bahwa jika upah minimum naik 1% maka jumlah penduduk miskin di Kota Jambi akan turun sebanyak 0.007761 dan 0.005330 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini sama dengan Penelitian Ronald (2022) mengenai Determinan Kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 2022 yang mengungkapkan hal senada yaitu variabel UMK signifikan dan mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Ronald menyimpulkan Faktor-Faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode waktu 2002-2019 adalah Inflasi, Laju Pertumbuhan PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jaminan Kesehatan Daerah. Begitupun hasil penelitian oleh Romi et al. (2018) berjudul Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi selama periode Tahun 2001 - 2015. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda dalam bentuk semilog menyimpulkan secara parsial variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Peneliti lain Quispe-Mamani et al. (2022) berjudul *Social Factors Associated with Poverty in Households in Peru* mengungkap pendapatan ekonomi kepala rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Peru dengan probabilitas sebesar 0,000828%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upah minimum telah berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan pekerja, terutama mereka yang berada di kelompok pendapatan rendah. Upah minimum yang memadai membuat daya beli masyarakat terutama pekerja berpendapatan rendah akan meningkat ketika upah minimum dinaikan. Peningkatan daya beli inilah yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Sepanjang tahun 2002-2024, besaran upah minimum baik Upah

Minimum Provinsi ataupun Upah Minimum Kota yang diterapkan di Kota Jambi setiap tahunnya selalu meningkat. Selain itu jika dibandingkan, biaya hidup di Kota Jambi yang relatif lebih rendah dibandingkan kota besar lainnya, sehingga kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Meski demikian keberhasilan ini juga bergantung pada pengawasan implementasi kebijakan dan dukungan pemerintah dalam memastikan dampak positifnya dirasakan secara luas. Pemerintah daerah harus konsisten dalam mengawasi implementasi upah minimum untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi pekerja rentan sehingga mereka lebih terlindungi dari risiko kemiskinan akibat pendapatan yang tidak mencukupi.

#### **5.3.4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Kota Jambi**

Dalam jangka panjang dan pendek, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi dengan koefisien sebesar -0.043842 dan -0.094284. Nilai ini menunjukkan bahwa jika IPM naik 1% maka jumlah penduduk miskin di Kota Jambi akan turun sebanyak 0.043842 jiwa dalam jangka panjang dan 0.094284 dalam jangka pendek. Hal ini sama dengan hasil penelitian Ratu Gandasari (2016) bahwa tingkat kemiskinan menurun saat IPM meningkat. Hal ini menunjukkan peningkatan IPM yang merupakan indikasi tingginya kualitas sumber daya manusia berakibat pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja penduduk akan meningkatkan perolehan pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang meningkat menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta dapat menurunkan kemiskinan. Begitupun penelitian penelitian Karolinska et al. (2023) bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berkurangnya kemiskinan karena IPM yang meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Kondisi ini sejalan dengan Teori Ragna Nurkse (1953) tentang lingkaran kemiskinan menyebutkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tempat

berlindung dan kesehatan menjadi penyebab kemiskinan. Sehingga ketika IPM meningkat, itu mencerminkan perbaikan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang semuanya merupakan faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan, individu menjadi lebih produktif dan mampu mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Teori Ragna Nurkse (1953) tentang lingkaran kemiskinan menyebutkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tempat berlindung dan kesehatan menjadi penyebab kemiskinan. Amartya Sen (1976) juga melihat kemiskinan dari dimensi pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi serta kebebasan masyarakat untuk ekonomi.

### **5.3.5. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kota Jambi**

Variabel Jumlah penduduk dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Jambi dengan koefisien sebesar 2.279029. Artinya jika jumlah penduduk naik 1% maka jumlah penduduk miskin di Kota Jambi juga naik 2.279029 jiwa dengan ketentuan jika variabel lain tetap. Sedangkan dalam jangka pendek, jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota Jambi dengan koefisien -2.301898. Menurut Todaro, jumlah penduduk yang meningkat memang akan berpengaruh positif pada kemiskinan. Hal ini sama seperti penelitian Muhammad et al.(2023) berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia yang mengungkapkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, Cebula & Davis (2022) juga melakukan penelitian berjudul *Determinants of poverty in the US state of Virginia: an examination of the impact of rent (the neglected variable)* mengungkapkan kemiskinan berpengaruh positif dengan persentase populasi yang bekerja di sektor pertambangan. Sartono (2023) juga mengungkapkan hal senada bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang Hari.

Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk yang searah dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Jambi merupakan fenomena yang lazim di

berbagai daerah berkembang. Jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja, akses ke layanan dasar, dan distribusi ekonomi yang merata dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Kota Jambi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup penciptaan lapangan kerja, pengelolaan urbanisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengendalian pertumbuhan penduduk untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Di Kota Jambi misalnya jumlah penduduk yang terus bertambah tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran juga tinggi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Disisi lain, urbanisasi dan migrasi yang terjadi di Kota Jambi harus menjadi perhatian jika didominasi untuk pekerja sektor informal yang rentan terjerumus kemiskinan karena memiliki pendapatan rendah.

Disisi lain, dalam jangka pendek, peningkatan jumlah penduduk justru dapat menurunkan kemiskinan. Kondisi ini bisa saja terjadi karena beberapa hal seperti peningkatan permintaan barang dan jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor produksi yang berusaha memenuhi tersebut sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini seperti lazim terlihat dimana saat hadirnya penduduk baru maka dapat menciptakan usaha kecil atau informal dalam jangka pendek. Meski tidak selalu ideal, hal ini tentu berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Meski demikian hal ini tidak serta merta membiarkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jambi begitu saja karena jika tidak dikelola dengan baik peningkatan jumlah penduduk akan menekan sumber daya yang ada dan memperburuk kemiskinan dalam jangka panjang

#### **5.4. Implikasi Hasil Penelitian**

Jumlah penduduk miskin di Kota Jambi dalam jangka panjang dan pendek dipengaruhi oleh IPM, upah minimum dan jumlah penduduk. Dalam jangka panjang dan pendek kenaikan IPM dan upah minimum maka akan diikuti dengan penurunan kemiskinan begitupun sebaliknya. Jika IPM dan upah minimum turun maka akan terjadi kenaikan pada kemiskinan di Kota Jambi. Sedangkan jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan di Kota Jambi pada

jangka panjang. Artinya jika jumlah penduduk naik maka akan terjadi kenaikan juga pada kemiskinan di Kota Jambi. Begitupun saat jumlah penduduk turun maka akan turun pula kemiskinan di Kota Jambi. Sementara itu dalam jangka pendek, kenaikan jumlah penduduk di Kota Jambi justru dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan sebaliknya. Oleh sebab itu penanganan pengendalian jumlah penduduk perlu menjadi perhatian pemerintah karena menjadi pisau bermata dua.

Dalam jangka pendek, peningkatan jumlah penduduk ternyata dapat menurunkan kemiskinan. Fenomena ini bisa saja terjadi karena beberapa hal seperti peningkatan permintaan barang dan jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor produksi yang berusaha memenuhi tersebut sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini seperti lazim terlihat dimana saat hadirnya penduduk baru maka dapat menciptakan usaha kecil atau informal dalam jangka pendek. Meski tidak selalu ideal, hal ini tentu berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Meski demikian hal ini tidak serta merta membiarkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jambi begitu saja karena jika tidak dikelola dengan baik peningkatan jumlah penduduk akan menekan sumber daya yang ada dan memperburuk kemiskinan. Dimana dalam jangka panjang, jumlah penduduk yang naik akan diikuti dengan kenaikan kemiskinan begitupun sebaliknya. Jumlah penduduk turun maka kemiskinan di Kota Jambi juga akan turun. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk yang hampir terjadi setiap tahun menjadi *warning* tersendiri bagi pemerintah. Jumlah penduduk yang terus bertambah akan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Pemerintah perlu menekan laju pertumbuhan penduduk seperti dari sisi kelahiran. Program Keluarga Berencana (KB) harus diperkuat dan terus dijadikan edukasi penting ditengah-tengah masyarakat. Pertumbuhan penduduk jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang berkualitas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan memperburuk upaya penanganan kemiskinan. Saat ini Kota Jambi telah memberikan pelayanan KB gratis bagi pasangan usia subur melalui Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) sebagai salah satu wujud nyata pengentasan kemiskinan dengan menekan angka kelahiran.

Secara keseluruhan dalam penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Jambi harus memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, besaran Upah Minimum Kota (UMK) dan peningkatan pembangunan manusia melalui perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting dalam penetapan besaran UMK yang terbukti memiliki dampak pada penurunan jumlah penduduk miskin dalam jangka pendek maupun panjang. Meski demikian, Pemerintah Kota Jambi perlu memastikan bahwa kenaikan UMK setiap tahunnya tidak membebani perusahaan namun juga tidak merugikan para karyawan. Besaran UMK harus memertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hal lain yang juga perlu jadi perhatian. Sementara itu, IPM yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dalam jangka panjang dan pendek harus terus ditingkatkan. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan pada aspek pendidikan dan kesehatan seperti peningkatan akses/layanan pada kesehatan dan pendidikan. Beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti pendidikan dan kesehatan gratis, bantuan beasiswa, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan minat baca serta mendorong wajib belajar hingga lebih dari 12 tahun.

Adapun pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yakni pertumbuhan yang produktif pada semua sektor ekonomi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini tampak sudah disadari Pemkot Jambi dengan menaruh perhatian besar pada pemberdayaan UMKM sebagai salah satu langkah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023. Beberapa rencana aksi dalam pengentasan Kemiskinan ini seperti Bantuan Sosial Ekonomi Produktif, Pelatihan/Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, Pelatihan Pembuatan Abon Ikan, Pelatihan Pengolahan Sampah, Inseminasi Buatan, Pelatihan Barista, Pelatihan Teknis Pengolahan Makanan, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Kerajinan Tangan (Handy Craft) dan Achievement Motivation Training serta Pembinaan UMKM dan Kurasi Produk UMKM. Selain

itu ada juga Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelatihan Tata Rias Kecantikan dan Pelatihan Satpam hingga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Salah satu program adalah program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH), masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah. Pemenuhan layanan air bersih dan air limbah pada masyarakat perkotaan merupakan kebutuhan dasar yang akan berkaitan langsung kepada derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya IPM yang kompetitif. Pemerintah Kota Jambi juga telah melakukan akselerasi perluasan layanan air limbah melalui pembangunan IPAL terpusat dan peningkatan sistem pengangkutan dan pengolahan setempat. Sedangkan untuk memperluas cakupan dan peningkatan kualitas layanan air minum Pemerintah Kota Jambi telah melakukan peremajaan jaringan dan penguatan sistem produksi maupun distribusi. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan lain seperti penyaluran bantuan sosial seperti subsidi barang pokok, bantuan sosial masyarakat miskin, gelar pangan murah, bantuan pendidikan masyarakat miskin, iuran jaminan kesehatan, bantuan tenaga pendidik dan bantuan paket logistik sembako.